

TAHUN
20
22



DINAS PERHUBUNGAN



www.dishub.tanjabbarkab.go.id



(0742) 7351069



LAKIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT. yang telah memberikan kemudahan sehingga dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Tahun 2022 ini dengan tepat waktu. Tanpa pertolongan-Nya tentunya tidak akan sanggup untuk menyelesaikan makalah ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda tercinta kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa'atnya di akhirat nanti.

Penyusunan LKIP merupakan amanat pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta disusun berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan merupakan laporan tahunan yang dibuat setiap akhir tahun dan sebagai bahan tolok ukur kinerja yang digunakan untuk menilai pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Kuala Tungkal, 24 Februari 2023

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



SYAMSUL JUHARI, S.Sos

Pemimpin Utama Muda

NIP. 19701223 199203 1 001





BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

Dasar hukum pembentukan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah ditetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 51 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Daerah sebagai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan unsur pelaksana dibidang pengawasan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Aspek strategis organisasi yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat meliputi aspek strategis internal dan eksternal, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Konektivitas dan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja, dan Keuangan
3. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap sarana prasarana transportasi darat dan laut yang diarahkan melalui peningkatan kinerja pelayanan angkutan agar dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, industri dan pariwisata.





4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas dan layanan bidang perhubungan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kelancaran dan keselamatan sehingga dapat mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kondisi sarana prasarana kelengkapan jalan dan faktor teknis kendaraan.
5. Meningkatkan kualitas pengujian kendaraan bermotor secara berkala dan keselamatan sarana prasarana keselamatan lalu lintas
6. Tersedianya Sumber Daya Aparatur Pengawasan yang profesional, kompeten dan berintegritas.

C. PERMASALAHAN UTAMA YANG SERING DIHADAPI ORGANISASI

Isu- isu strategis dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan sesuai analisis dan evaluasi serta prediksi terhadap pelaksanaan tugas pengawasan yang menyebabkan dan menimbulkan permasalahan-permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi, khususnya pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

1. Masih belum optimalnya sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
2. Masih adanya ruas jalan yang digunakan selain untuk kepentingan lalu lintas yang dapat menimbulkan kemacetan dan berdampak terhadap polusi udara dan kebisingan kendaraan;
3. Jaringan trayek angkutan jalan masih terdapat tumpang tindih;
4. Masih adanya kawasan yang belum terlayannya trayek angkutan kota;
5. Masih rendahnya pengawasan pengendalian angkutan umum AKAP/AKDP yang melintasi wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
6. Keterbatasan jumlah terminal tipe c;
7. Jaringan lintas angkutan barang belum tertata baik;
8. Masih adanya kendaraan angkutan umum yang tidak lulus uji;
9. Masih lambatnya penanganan kebutuhan dan/atau pengaduan masyarakat terhadap perlengkapan jalan pada ruas jalan nasional dan/atau provinsi yang berada di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.





4. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI.

Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas pokok Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di Bidang Perhubungan.

A. Fungsi

Untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Perhubungan Menyelenggarakan Fungsi :

- a. Merumuskan Kebijakan di bidang perhubungan darat dan bidang perhubungan laut, sungai dan penyeberangan;
- b. Melaksanakan kebijakan di bidang perhubungan darat dan perhubungan sungai danau dan penyeberangan;
- c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan darat dan perhubungan laut sungai danau dan penyeberangan;
- d. Melaksanakan administrasi dinas di bidang perhubungan darat dan bidang perhubungan laut sungai danau dan penyeberangan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya.

Susunan organisasi aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris; yang membawahi :
 - Sub Bagian Umum dan Keuangan
 - Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program
3. Bidang Perhubungan Darat; yang membawahi :
 - Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat





- Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Seksi Operasi dan Keselamatan
- 4. Bidang Perhubungan Laut, Sungai dan Penyeberangan; yang membawahi :
 - Seksi Sarana dan Prasarana Laut, Sungai dan Penyeberangan
 - Seksi Angkutan dan Kepelabuhan
 - Seksi Keselamatan Pelayaran

B. Uraian Tugas

Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Perhubungan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Selanjutnya tugas pokok dan rincin tugas dari masingmasing jabatan sebagaimana tersebut di atas ditaur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, sebagai berikut:

1) SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas perhubungan.

Dalam melaksanakan tugas, sekretariat memiliki fungsi :

- a. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan;
- b. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan keuangan meliputi :
ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan asset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi dan tindak lanjut LHP;
- c. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang – undangan;
- d. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan





- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2) SUBBAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan asset, kerja sama, kehumasan, ketatalaksanaan, dan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan keuangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kesepakatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- c. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
- d. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan penendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP);
- e. Melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang – undangan, tata laksana dan hubungan masyarakat;
- f. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penebitan surat perintah membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan Laporan Keuangan;





- g. Melakukan pemeliharaan dan pengelolaan asset dan perlengkapan, pengelolaan inventaris barang milik negara dan penyusunan laporan asset;
- h. Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan;
- i. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/intansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

3) SUBBAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PROGRAM

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan program.

Dalam melaksanakan tugasnya, subbagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan program memiliki fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan program;
- b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran;
- c. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari bidang – bidang untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja;
- d. Melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja;
- e. Melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan anggaran meliputi anggaran APBD, APBN, PHLN baik kabupaten, provinsi dan pusat secara lintas program;
- f. Melakukan penyusunan Laporan Kinerja (LKJ), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU_ dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD); dan
- g. Melakukan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.





4) BIDANG PERHUBUNGAN DARAT

Bidang perhubungan darat memiliki tugas merumuskan kebijakan, melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, dan prosedur, bimbingan teknis dan supervise, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, system lalu lintas dan angkutan jalan, serta keselamatan transportasi di bidang perhubungan darat.

Dalam melaksanakan tugasnya bidang perhubungan darat memiliki fungsi :

- a. Penyusunan pelaksanaan, dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang perhubungan darat;
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, system lalu lintas dan angkutan jalan, keselamatan transportasi darat serta perkeretaapian.
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan lalu lintas, dan angkutan jalan, keselamatan transportasi darat serta perkeretaapian;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, keselamatan transportasi darat serta perkeretaapian;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, keselamatan transportasi darat serta perkeretaapian;
- f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap UPTD lingkup perhubungan darat; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

5) Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat





Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, kebijakan teknis, menyusun rekomendasi, persyaratan, penetapan lokasi, pengadaan, pemeliharaan, pemasangan perlengkapan jalan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup sarana dan prasarana perhubungan darat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerjadan anggaran seksi;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakanteknis sarana dan prasarana perhubungan darat;
- c. melakukan penyiapan penetapan lokasi terminal dan persyaratan pengesahan pengoperasian terminal penumpang tipe c, bahan persyaratan pengesahan pembangunan terminal angkutan barang, serta proses pengesahan rancang bangun terminal penumpang tipe c;
- d. melakukan penyusunan bahan rekomendasi penetapan kelas jalan dan jaringan jalan kabupaten;
- e. melakukan penyiapan rencana penetapan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten;
- f. melakukan penyiapan rencana penetapan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten, dan rekomendasi persyaratan perizinan penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir umum;
- g. melakukan penyiapan rekomendasi perizinan usaha mendirikan pendidikan dan pelatihan mengemudi dan perbengkelan;
- h. melakukan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan seksi; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.





6) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, penetapan kawasan, rencana induk jaringan LLAJ, jaringan trayek, jaringan lintas, pemberian rekomendasi, fasilitasi penyediaan angkutan, pemantuan, evaluasi dan pelaporan lingkup lalu lintas dan angkutan jalan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan lingkup lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. melakukan penyiapan bahan penetapan rencana induk jaringan LLAJ kabupaten, penetapan kawasan perkotaan untuk angkutan perkotaan dalam kabupaten, penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kabupaten, dan penetapan rencana umum jaringan trayek angkutan perkotaan/pedesaan;
- d. melakukan fasilitasi penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam kabupaten;
- e. melakukan penyiapan pemberian rekomendasi izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, rekomendasi izin trayek angkutan perkotaan/pedesaan, rekomendasi izin trayek angkutan umum, AKDP dan AKAP, dan rekomendasi izin penggunaan jalan umum selain untuk kepentingan lalu lintas;
- f. melakukan penyiapan rekomendasi penetapan rencana induk perkeretaapian dalam wilayah Daerah, rekomendasi penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya terletak di dalam wilayah Daerah dan rekomendasi penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas





- Daerah serta rekomendasi penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian yang jaringannya dalam wilayah Daerah;
- g. melakukan penyiapan persyaratan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kabupaten
 - h. melakukan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan seksi; dan
 - i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

7) Seksi Operasi dan Keselamatan

Seksi Operasi dan Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pencegahan, pengujian, rekomendasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup operasi dan keselamatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Operasi dan Keselamatan mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. melakukan pengawasan dan pengendalian operasional penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas, izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor, izin usaha angkutan pariwisata, angkutan barang dan angkutan khusus serta izin trayek angkutan kota/pedesaan;
- c. melakukan penyiapan rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas (ANDALALIN) dan data analisis dampak lalu lintas (ANDALALIN), bahan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan lalu lintas, penyuluhan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, pengujian berkala (keur) kendaraan bermotor dan penertiban serta penegakan hukum pada pelanggaran lalu lintas angkutan jalan;
- e. melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas jaringan jalan Daerah;





- f. melakukan koordinasi, pengawasan, pengendalian keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas, serta pemanduan rute untuk pejabat dan/atau tamu daerah;
- g. melakukan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan seksi; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

8) BIDANG PERHUBUNGAN LAUT, SUNGAI DAN PENYEBERANGAN

Bidang Perhubungan Laut, Sungai dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar dan prosedur, pembinaan, pengawasan, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan laut, sungai dan penyeberangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perhubungan Laut, Sungai dan Penyeberangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang perhubungan laut, sungai dan penyeberangan;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan perencanaan, pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan pelabuhan sungai dan penyeberangan, rencana induk jaringan prasarana transportasi sungai dan penyeberangan, pemaduan rencana kegiatan prasarana transportasi sungai dan penyeberangan, pengembangan jaringan prasarana transportasi sungai dan penyeberangan, kompetensi petugas pelabuhan sungai dan penyeberangan serta pengembangan teknologi informasi dan komunikasi prasarana lalu lintas sungai dan penyeberangan dalam kabupaten;
- c. penetapan standar batas maksimum sertifikasi (kelaikan kapal laik berlayar);





- d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap UPT lingkup perhubungan laut, sungai dan penyeberangan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

9) Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut, Sungai dan Penyeberangan

Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut, Sungai dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, melaksanakan pemeriksaan, pelaporan, koordinasi, pemeliharaan, pengawasan, pemberian rekomendasi pemantuan, evaluasi dan pelaporan lingkup sarana dan prasarana perhubungan laut sungai dan penyeberangan.

Dalam melaksanakan nya, Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut Sungai dan Penyeberangan mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. melakukan pengukuran, pemeriksaan terhadap konstruksi dan permesinan kapal;
- c. melakukan penyiapan rekomendasi penetapan izin lokasi terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri, rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan sungai dan pelabuhan penyeberangan, baha pertimbangan teknis penambahan atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan sungai dan menyiapka rancang bangun fasilitas pelabuhan sungai lokal;
- d. melakukan pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) perusahaan angkutan laut dan sungai dan pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (liner);
- e. melakukan koordinasi, pemeliharaan dan pengawasan untuk penetapan pemasangan rambu-rambu;
- f. melakukan penyusunan dan menetapkan rencana umum jaringan trayek angkutan sungai dan penyeberangan dalam kabupaten;





- g. melakukan penyiapan rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan, dan rencana pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai, dan memberikan rekomendasi teknis kegiatan salvage, dan Pekerjaan Bawah Air (PBA);
- h. melakukan pemetaan alur sungai kebutuhan transportasi;
- i. melakukan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan seksi; dan
- j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

10) Seksi Angkutan dan Kepelabuhan

Seksi Angkutan dan Kepelabuhan mempunyai tugas merekomendasikan izin usaha, izin trayek, izin pembangunan dan pengoperasian, izin pengembangan dan pengerukan, pemantuan, evaluasi dan pelaporan lingkup angkutan dan kepelabuhan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Angkutan dan Kepelabuhan mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. merekomendasikan izin usaha angkutan laut dan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat orang perorangan atau badan usaha;
- c. merekomendasikan izin usaha penyelenggaraa angkutan sungai dan penyeberangan orang perseorangan atau badan usaha;
- d. merekomendasikan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan penyeberangan serta izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan;
- e. merekomendasikan/izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal, sungai dan penyeberangan, merekomendasikan izin usaha badan usaha pelabuhan pada pelabuhan pengumpul lokal;
- f. merekomendasikan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal;





- g. merekomendasikan izin pengembangan pelabuhan dan izin pengoperasian pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal;
- h. merekomendasikan penerbitan izin pekerjaan pengerukan dan penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
- i. merekomendasikan penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal;
- j. melakukan pelayanan rekomendasi/pemberian izin usaha pelayaran rakyat (Pelra), bongkar muat angkutan barang khusus dan barang berbahaya, ekspedisi, angkutan sungai;
- k. melakukan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan seksi; dan
- l. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkat dengan tugasnya.

11) Seksi Keselamatan Pelayaran

Seksi Keselamatan Pelayaran mempunyai tugas menyusun rencana dan program kerja, memberikan rekomendasi lintas penyeberangan, pengoperasian kapal, pengamanan, penertiban, penegakan hukum, pemantuan, evaluasi dan pelaporan lingkup keselamatan pelayaran.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Keselamatan Pelayaran mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. merekomendasikan penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal yang terletak pada jaringan jalan kabupaten dan/atau jaringan jalur kereta api;
- c. melakukan pengamanan, penertiban, penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas sungai;
- d. melakukan pelayanan surat persetujuan berlayar dan pas perairan daratan kapal, melakukan pemeriksaan perlengkapan navigasi kapal dan melakukan pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan;

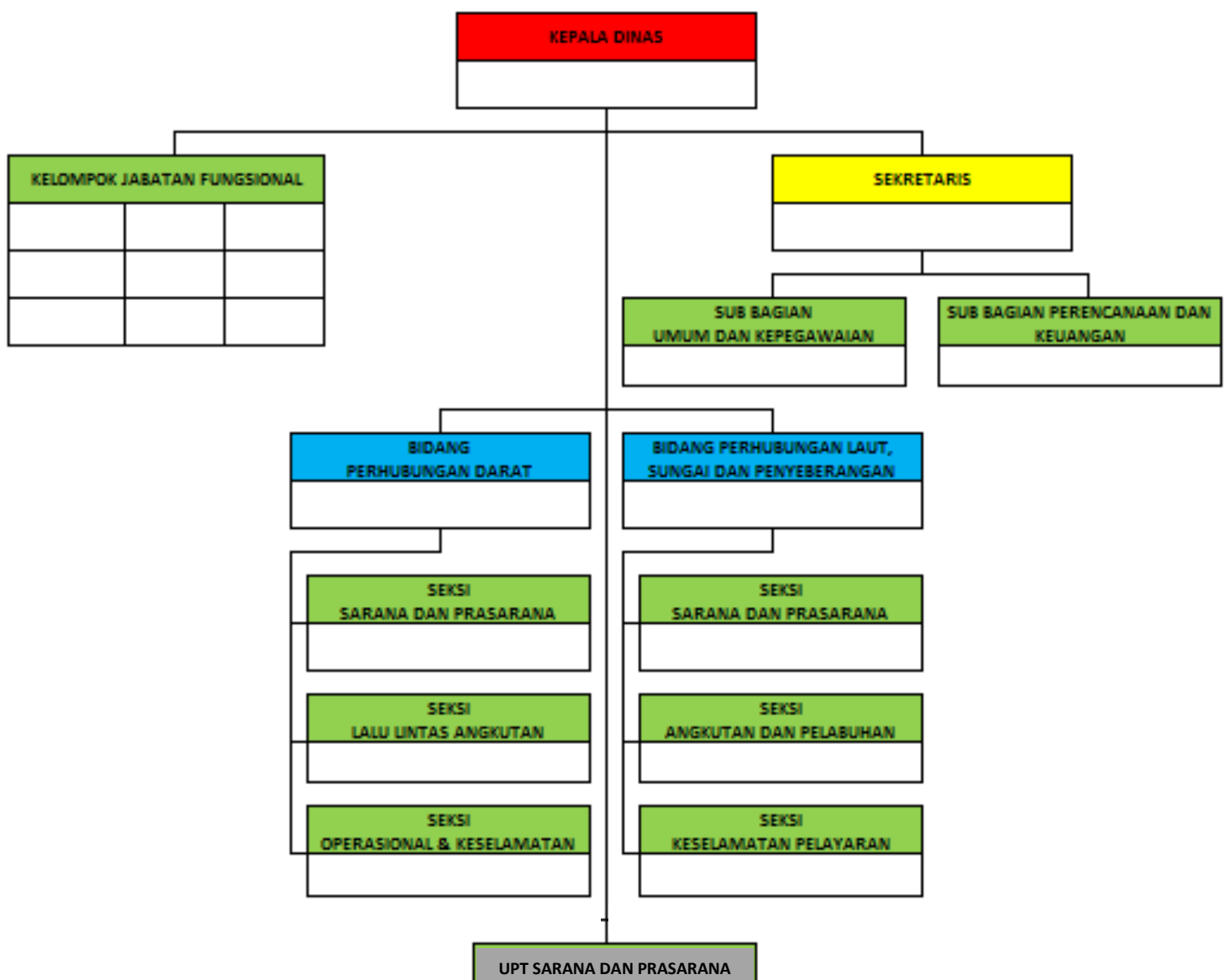




- e. melakukan penerbitan sertifikat keselamatan kapal, pas kecil, pencatatan kapal dalam buku register pas kecil dan dokumen pengawakan kapal di bawah GT 7 (<GT7);
- f. melakukan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan seksi; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan

D. STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT





E. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Sumber Daya Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya lainnya seperti peralatan/ perlengkapan/ asset

1. Sumber Daya Manusia

Guna mendukung dan menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dimilikinya Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri atas PNS, TKS dan TKK yang terdiri dari 31 (Tiga Puluh Satu) PNS dan 90 (Sembilan Puluh) TKK.

Jika ditinjau dari kepegawaian dan tingkat tingkat pendidikan, komposisi sumber daya manusia pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1

SDM Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat





No	Uraian	Jumlah	Pria	Wanita
1	Jumlah Pegawai berdasarkan Eselon : - Eselon II - Eselon III - Eselon IV - Non Eselon Jumlah	 1 3 11 16 31	 1 3 10 13 7	 - - 1 3 4
2	Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan : - SD - SMP - SMA - D II - D III - D IV - S.1 - S.2 Jumlah	 1 1 12 1 2 0 12 2 31	 1 1 11 1 1 0 10 2 27	 0 0 1 0 1 0 2 0 4
3	Jumlah Pegawai berdasarkan Status : - PNS - Kontrak	 31 90	 27 81	 4 9
4	Pendidikan Perjenjangan Aparatur : - Diklat PIM II - Diklat PIM III - Diklat PIM IV	 0 1 3	 0 1 3	 0 0 0

2. Sumber Daya Lainnya

Sumber Daya lainnya seperti peralatan, perlengkapan baik berupa aset bergerak maupun tidak bergerak. Adapun aset yang mendukung kegiatan pelayanan dan





operasional pada yang ada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Aset Pendukung Kegiatan Pelayanan Dan Operasional
Pada Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Barat

No	Jenis Asset	Jumlah	Ket
1.	Prasarana		
	a. Gedung kantor Dishub	1 unit	
	b. Gedung hanggar bongkar muat barang	1 unit	
	c. Terminal Kota	2 unit	
	d. Gedung UPT Sarana dan Prasarana	1 unit	
	e. Gedung Pos pengujian kendaraan bermotor	1 unit	
	f. Pos pengawasan di dermaga	1 unit	
	- Dermaga LLASDP	1 unit	
	- Dermaga tangga raja ulu	1 unit	
	- Dermaga ampera	1 unit	
	- Dermaga kuatik	18 unit	
	g. Halte sungai		
2.	Sarana	1 unit	
	a. Kendaraan operasional kepala dinas	2 unit	
	b. Kendaraan operasional LLAJ	3 unit	
	c. Kendaraan operasional bus sekolah	21 unit	
	f. Kendaraan operasional dinas roda dua	1 unit	
	g. Kendaraan operasional roda tiga	1 unit	
	g. Kendaraan operasional air (speedboat)		





3.	Fasilitas Keselamatan Transportasi		
	a. Rambu darat	433 unit	
	b. Rambu type F	8 unit	
	c. Rambu Mini	15 unit	
	d. RPJJ (Rambu petunjuk jalan darat)	17 unit	
	e. Pagar temporer	39 unit	
	f. Warning light	12 unit	
	h. Traffic light	2 unit	
	i. Guadrail	1 paket	
	j. Median	1 paket	
	k. Rambu sungai	30 nit	





BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026. Visi dan Misi pada Dokumen Rencana Strategis (Renstra) mengacu pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, yaitu :

1. Visi.

“Menuju Tanjung Jabung Barat Berkah 2024” (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)

2. Misi.

Adapun Misi Bupati Tanjung Jabung Barat 2021 - 2026, dalam mencapai Visi sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu dan berahlak.
2. Mewujudkan kondisi sosial yang tentram, tertib, dan demokrasi
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik.





4. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan
5. Pemerataan pembangunan daerah dari Desa sampai ke Kota.

Dalam mewujudkan visi misi Kepala Daerah, Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat termasuk kedalam misi ke 5 yaitu "Pemerataan Pembangunan Dari Desa Sampai Ke Kota"

3. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Meningkatnya tata kelola pengawasan pemerintahan daerah

Tujuan Awal (Tahun 2021)	Tujuan Setelah Evaluasi Kemenpan RB & Tim SAKIP (Tahun 2022)
Meningkatkan pembangunan infrastruktur transportasi yang handal dan berkualitas.	Terwujudnya Konektivitas dan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

4. Sasaran

Berdasarkan tujuan tersebut diatas, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan sasaran yang akan dicapai melalui keberhasilan dari indikator - indikator yang telah ditetapkan. Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

Sasaran Awal (Tahun 2021)	Sasaran Setelah Evaluasi Kemenpan RB & Tim SAKIP
----------------------------------	---





(Tahun 2022)	
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Sektor Perhubungan Darat, Sungai dan Penyeberangan	Meningkatnya Konektivitas dan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.
Menurunnya Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Transportasi Darat Transportasi Laut, Sungai dan Penyeberangan	
Meningkatnya Tertib Laik Kendaraan Angkutan Umum	

5. Indikator

Setelah perubahan Tahun 2022 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Sebagai berikut :

Indikator Awal (Tahun 2021)	Tujuan Setelah Evaluasi Kemenpan RB & Tim SAKIP (Tahun 2022)
Persentase Peningkatan Retribusi pada sektor Terminal Pembengis	Indeks Konektivitas Jaringan Jalan
Persentase Peningkatan Retribusi pada sektor UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	Indeks Konektivitas Pedesaan
Persentase Peningkatan Retribusi pada sektor kepelabuhan	Persentase Menurunnya Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Darat





Jumlah Kasus Kecelakaan Transportasi Darat	Persentase Prasarana Lalu lintas angkutan jalan, angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang tersedia berbanding dengan kebutuhan
Jumlah Kasus Kecelakaan di dermaga Sungai, Danau dan Penyeberangan	
Persentase Kendaraan yang Laik Jalan	

6. Sasaran, Strategis, Kebijakan dan Program

Berdasarkan tujuan dan indikator tujuan tersebut diatas, maka ditetapkan sasaran strategis dan kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dituangkan dalam 3 program seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut ini :

Sasaran	Indikator Kinerja	Analisis Capaian Tujuan		
		Strategi	Arah Kebijakan	Program
1.1. Meningkatnya Konektivitas dan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan, Angkutan Sungai, Danau dan	1.1.1. Indeks Konektivitas Jaringan Jalan	Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap sarana prasarana transportasi darat dan laut yang diarahkan melalui peningkatan	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan sarpras perhubungan yang terpadu dengan tata ruang wilayahPembin	Program Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
	1.1.2. Indeks Konektivitas Pedesaan			Program Pengelolaan Pelayaran





Penyeberangan.		kinerja pelayanan angkutan agar dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, industri dan pariwisata.	aan, pengawasan dan penertiban angkutan jalan.	
	1.1.3. Persentase Menurunnya Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Darat	Meningkatkan kualitas pengujian kendaraan bermotor secara berkala dan keselamatan sarana prasarana keselamatan lalu lintas	Pemenuhan dan pemeliharaan kondisi sarana prasarana LLAJ serta penetapan kondisi laik jalan angkutan untuk menunjang ketertiban, kelancaran, keamanan dan kenyamanan berlalu lintas.	Program lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)





	1.1.4. Persentase Prasarana Lalu lintas angkutan jalan, angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang tersedia berbanding dengan kebutuhan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas dan layanan bidang perhubungan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kelancaran dan keselamatan sehingga dapat mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kondisi sarana prasarana kelengkapan jalan dan faktor teknis kendaraan.	Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi dengan intensifikasi kegiatan gakum dan manajemen rekayasa lalu lintas guna menurunkan tingkat kecelakaan pasda sector darat dan laut.	Program lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) & Program Pengelolaan Pelayaran
1.2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan	2.1.1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).	Peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat	Menjamin adanya pemeliharaan serta	Program Penunjang Urusan Pemerintah





n Publik, Akuntabil itas Kinerja, dan Keuangan		melalui media teknologi informasi menuju e-government. Pemerintahan.	tersedianya administrasi perkantoran dan sarana prasarana penunjang penyelenggaraan pemerintahan	Daerah
	2.1.2.Nilai AKIP	Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi (TI) dan melakukan review kinerja dalam pelaksanaan tata kelola/administrasi/manajemen pemerintahan	Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan aplikasi berbasis teknologi dan informasi.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	2.1.3.Menurunnya Jumlah Temuan Administrasi dan Keuangan	Meningkatkan kualitas dan keprofesionalan aparat Dinas Perhubungan melalui peningkatan kualifikasi pendidikan dan	Peningkatan kualitas dan kapasitas penyelenggaraan pelayanan transportasi melalui peningkatan pendidikan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah





		pelatihan.	SDM Perhubungan.	
--	--	------------	---------------------	--

B. RENCANA KERJA TAHUN 2022

Pada tahun anggaran 2022, rencana kerja tahunan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Tanjung Jabung Barat dalam Penetapan Kinerja Tahun 2022 yang dituangkan dalam bentuk program, Kegiatan dan Sub kegiatan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 yang telah diselaraskan dengan Perjanjian Kerja tahun 2022, dan telah menyesuaikan Indikator Kinerja dengan yang ada di Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 adalah sebagai berikut

:

Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/dan Kegiatan (output)	Satuan	Target
2	4	5	6	8
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terlaksana	%	100%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia	%	16
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1





	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan OPD	Laporan	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang/Bulan yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan/Orang	12/30





	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	2
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Kartu Inventaris	%	100%
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	8
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Orang	134
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	132
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	2





	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	210
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	17
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	800
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	12
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah OPD yang tersedia	Unit	28





	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	2
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	10
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	10
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jas Penunjang Urusan Yang Tersedia	Bulan	12
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1





	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bangunan/kendaraan Kantor Kondisi Baik	Unit	95
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	32
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	54
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	7
Sasaran 5.1.2 Menguatkan ya konektivitas	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Tingkat Tertib Lalu Lintas Angkutan Jalan	%	100%





as dari desa sampai kota dan daerah perbatasan	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota yang tersedia	Dokumen	0
	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	1
	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen	0
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Yang Tersedia	Unit	50
	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit	30
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	20
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	%	100%
	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	Dokumen	0
	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	Unit	0
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	Unit	0





	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	0
	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	4
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Yang Tersedia	Dokumen	1
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	0
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	1
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	%	100%
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan	Unit	2





	Kendaraan Bermotor	Bermotor yang Tersedia		
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah aparaturnya yang mengikuti diklJumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnyaat struktural	Orang	0
	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Unit	1000
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan yang memenuhi standar laik jalan	Dokumen	0
	Sosialisasi Standar Operasional ProsedurPengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	0
	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Laporan	0
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	2
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan	%	100%





	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	1
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	36
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	3
	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota		%	100%
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	Dokumen	0
	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	1
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Laporan	0
	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	Laporan	0
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Terlaksananya Razia/operasi	Razia/operasi gabungan	2
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompeten	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor	Laporan	2





	si Pengemudi Kendaraan BermotorKabupaten/Kota	Kabupaten/Kota		
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	%	100%
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	0
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	5
	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	%	100%
	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	0





	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	0
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	%	100%
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Laporan	1
	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	Dokumen	1





	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1
Sasaran 5.1.2 Menguatkan ya konektivitas as dari desa sampai kota dan daerah perbatasan	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Tingkat Pemenuhan Pengelolaan Pelayaran	%	100%
	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	Persentase Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha	%	100%
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan IzinUsaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili OrangPerseorangan Warga Negara Indonesia atau BadanUsaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalamSistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan IzinUsaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili OrangPerseorangan Warga Negara Indonesia atau BadanUsaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalamSistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Dokumen	0





	Terintegrasi secara Elektronik			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	1
	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	%	100%
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam	Dokumen	0





	Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	1
	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	%	100%





	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan LintasPenyeberangan dan Persetujuan PengoperasianKapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yangTerletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kotadan/atau Jaringan Jalur Kereta ApiKabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1
	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan LintasPenyeberangan dan Persetujuan PengoperasianKapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yangTerletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kotadan/atau Jaringan Jalur Kereta ApiKabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	12
	Penetapan Tarif Angkutan PenyeberanganPenumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraanbeserta Muatannya pada Lintas Penyeberangandalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Tarif Angkutan PenyeberanganPenumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraanbeserta Muatannya pada Lintas Penyeberangandalam Daerah Kabupaten/Kota	%	100%





	Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0
	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1
	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	3
	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	%	0%





	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal\	Dokumen	0
	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi RencanaInduk dan Daerah Lingkungan Kerja(DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP)Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Dokumen	0
	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Laporan	0
	Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	%	100%
	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk danDaerah Lingkungan Kerja (DLKR)/DaerahLingkungan Kepentingan (DLKP) untuk PelabuhanSungai dan Danau	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	Dokumen	4





	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	Dokumen	0
	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Laporan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	Laporan	0
	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	%	0
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Dokumen	0
	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	Unit	0
	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	Laporan	0





	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Laporan	0
	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	%	0
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan	Dokumen	0
	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun	Unit	0
	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit	3
	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Lapora	0
	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan	Unit	0
	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara	Unit	3
	Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal	%	1





	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	0
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dilaksanakan	Laporan	1
	Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	%	1
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Dilaksanakan	Dokumen	0





	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Laporan	1
	Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	%	1
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	0
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dilakukan	Laporan	1
	Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam	Persentase Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	%	1





	DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal			
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Dilaksanakan	Dokumen	0
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	Laporan	1

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Berdasarkan program dan kegiatan serta sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka perjanjian kinerja tahun 2022 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah ditetapkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta program dan kegiatan serta anggaran yang mendukung pencapaian perjanjian kinerja tersebut. Berikut perjanjian kinerja tahun 2022 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu sebagai berikut :





Tabel 3
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	1.1. <u>Meningkatnya Konektivitas dan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan, Angkutan Sungai dan Angkutan Penyeberangan</u>	1.1.1. <u>Indeks Konektivitas Jaringan Jalan</u>	50%
		1.1.2. <u>Indeks Konektivitas Pedesaan</u>	60%
		1.1.3. <u>Persentase Menurunnya Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Darat</u>	30 %
		1.1.4. <u>Persentase Prasaranan Lalu Lintas Angkutan Jalan, Angkutan Sungai dan Angkutan Penyeberangan Yang Tersedia Berbanding Dengan Kebutuhan</u>	70%

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 pada dasarnya merupakan komitmen Kepala Perangkat daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja perangkat daerah menjadi tanggung jawab kepala perangkat daerah.





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja atas sasaran dan program dilakukan dengan membandingkan antara rencana/target dengan realisasi dari setiap indikator kinerja yang ditetapkan. Pengukuran kinerja diuraikan melalui formulir Pengukuran Kinerja (PK) sebagaimana disajikan pada lampiran 1 dan 2.

Indikator kinerja sasaran dan program telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Renstra. Indikator Kinerja yang digunakan dalam pengukuran capaian kinerja sasaran telah diuraikan dalam Bab II. Sedangkan indikator kinerja program atau Indikator Kinerja Utama meliputi: persentase ditindaklanjutnya rekomendasi hasil evaluasi, revidi dan pemeriksaan.

Pengukuran capaian kinerja tahun 2022 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pengukuran dilakukan terhadap kinerja yang diperjanjikan tahun 2022 dan membandingkannya dengan target yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2022 antara Kepala Dinas Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Bupati Tanjung Jabung Barat. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah tanggal 31 Desember 2021, Peraturan





Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tanggal 31 Desember 2021, dan Peraturan Bupati capaian kinerja inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel 4
Realisasi dan Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi	Realisasi		Target 2022			Sumber Data	KET
				2020	2021	Target	Realisasi	Capaian %		
1	Terwujudnya Konektivitas dan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Indeks Konektivitas Jaringan Jalan	Rumus Indikator : Jumlah Jaringan Trayek Thn. N / Target Ketersediaan Jaringan Trayek	50%	50%	60%	0%	0%	Dishub	
		Indeks Konektivitas Pedesaan	Jumlah dokumen perencanaan halte sungai yang tersusun	2 Dok	2 Dok	2 Dok	3 Dok	150%	Dishub	
		Persentase Prediksi Menurunnya Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas	Jumlah Laka Lantas Yang Terjadi di tahun-n x 100% Jumlah Laka Lantas Yang Terjadi di tahun n-1	70%	80%	60 Kasus	65 Kasus	108%	Dishub dan Sat Lantas	
		Persentase Prasarana Lalu lintas angkutan jalan, angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang tersedia berbanding dengan kebutuhan	Rumus Indikator : Jumlah Fasilitas Perlengkapan jalan yang terpasang / Jumlah Kebutuhan Fasilitas perlengkapan jalan x 100% Sumber Data : Hasil Pendataan Dinas Perhubungan	0 Unit	85%	22 Unit	8 Unit	36%	Dishub	

Uraian Pengukuran dan Analisis Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022 Perbandingan pada tahun sebelumnya :

1. SASARAN STRATEGIS 1

Sasaran 1 Dinas Perhubungan adalah Menguatnya Konektivitas dan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan. Sasaran 1 memiliki 4 indikator kinerja yang mendukung terlaksananya sasaran tersebut, yaitu :

a. Realisasi Capaian Target Kinerja (%)

1. Indikator 1 : Indeks Konektivitas Jaringan Jalan

Indikator sasaran ini bertujuan sebagai upaya pemenuhan pelayanan publik menyangkut peningkatan ekonomi masyarakat, dan juga sebagai tolak ukur pencapaian misi RKPD Kab. Tanjung Jabung Barat untuk mengembangkan





konektivitas antar pedesaan ke kota sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan ekonomi di desa maupun kota.

Pada indikator ini pencapaian kinerja kinerja Tahun 2021 mencapai angka 50% atau realisasi 50% dengan target 60% tersedianya dokumen jaringan trayek angkutan penumpang. Pada tahun 2022 pencapaian target **kurang baik**. Perbandingan antara realisasi di tahun 2021 **50%** dan realisasi di tahun 2022 **0%**.

Permasalahan dan Solusi

❖ Permasalahan

- Serapan kebutuhan anggaran untuk penyusunan dokumen jaringan trayek belum terpenuhi.
- Belum terbentuk tim teknis penyusun dokumen jaringan trayek,

❖ Solusi

- Alokasi anggaran pada kegiatan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas agar dapat direalisasikan tiap tahunnya.
- Pengembangan Jaringan Lalu Lintas perhubungan Darat seperti jaringan trayek .
- Membentuk tim teknis penyusun dokumen jaringan trayek.

2. Indikator 2 : Indeks Konektivitas Pedesaan

Indikator sasaran ini bertujuan sebagai upaya pemenuhan pelayanan publik menyangkut kebutuhan sarana transportasi, dan juga sebagai tolak ukur pencapaian misi RKPD Kab. Tanjung Jabung Barat untuk mengembangkan konektivitas antar pedesaan ke kota sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan ekonomi di desa maupun kota.

Pada indikator ini, capaian kinerja diukur melalui tersedianya dokumen halte sungai. Pencapaian kinerja kinerja Tahun 2021 mencapai angka **diatas**





100% atau realisasi 3 Dokumen halte sungai yang sudah tersusun dengan target 2 Dokumen .pada tahun 2022 pencapaian target sudah **sangat baik**. Perbandingan antara realisasi di tahun 2021 **100%** dan realisasi di tahun 2022 **>100%**.

Permasalahan dan Solusi

❖ Permasalahan

- Serapan kebutuhan anggaran untuk penyusunan dokumen perencanaan halte sungai.
- Perlu menyusun proposal maupun dokumen pembangunan halte sungai,

❖ Solusi

- Alokasi anggaran pada kegiatan penyusunan dokumen halte sungai agar dapat direalisasikan tiap tahunnya.
- Penyempurnaan penyediaan fasilitas perhubungan laut, sungai danau dan penyeberangan seperti halte sungai.
- Meningkatkan Pengendalian, Pengawasan terhadap layanan angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

3. Indikator 3 : Persentase Prediksi Menurunnya Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas

Indikator sasaran ini bertujuan untuk upaya pemenuhan sarana keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Pada indikator ini pencapaian kinerja kinerja Tahun 2021 mencapai angka 80% atau realisasi 65 Kasus dengan target 80 kasus. pada tahun 2022 pencapaian target terbilang **baik** karena perbandingan persentase meningkat dan menunjukkan kasus yang terjadi lebih rendah dari prediksi target yang





ditentukan. Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Barat. Perbandingan antara realisasi di tahun 2021 **60 Kasus** dan realisasi di tahun 2022 **55 Kasus**.

Permasalahan dan Solusi

❖ Permasalahan :

- Masih minimnya sarana dan prasarana lalu lintas angkutan seperti marka, rambu lalu lintas, halte, traffic light dan lainnya merupakan sarana prasarana perhubungan yang mendukung pelayanan terhadap pengguna jasa transportasi. Sarana dan prasarana tentunya menjadi instrument penting menuju keselamatan lalu lintas.
- Kurangnya partisipasi warga kabupaten untuk memahami dan mematuhi aturan lalu lintas.

❖ Solusi

- Pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan
- Peningkatan SDM Aparatur melalui diklat dan pelatihan khusus
- Penagakan hukum dan melakukan operasi tertib lalu lintas
- Memberikan sosialisasi yang berkaitan dengan keselamatan lalu lintas

4. Indikator 2 : Persentase Prasarana Lalu lintas angkutan jalan, angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang tersedia berbanding dengan kebutuhan .

Indikator sasaran ini bertujuan untuk upaya pemenuhan sarana keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan pengguna jasa transportasi laut, sungai danau dan penyeberangan.

Pada indikator ini pencapaian kinerja tahun 2021 mencapai predikat **cukup baik**, karena jumlah ketersediaan prasarana yang diukur melalui penyediaan rambu rambu lalu lintas hampir memenuhi target yang di





tentukan. Pada tahun 2021 realisasi mencapai angka 55% dengan target 20 unit dan Realisasi tahun 2022 mencapai angka 36% dengan target 22 unit. Perbandingan Realisasi penyediaan prasarana transportasi pada tahun 2021 adalah **55%** dan di tahun 2022 **36%**.

Permasalahan dan Solusi

❖ Permasalahan :

- Masih minimnya sarana dan prasarana lalu lintas angkutan seperti rambu lalu lintas dan lainnya sebagai sarana prasarana perhubungan yang mendukung pelayanan terhadap pengguna jasa transportasi laut sungai dan penyeberangan. Sarana dan prasarana tentunya menjadi instrument penting menuju keselamatan transportasi.
- Kurangnya partisipasi warga kabupaten untuk memahami dan mematuhi aturan lalu lintas.

❖ Solusi

- Pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan
- Peningkatan SDM Aparatur melalui diklat dan pelatihan khusus
- Penagakan hukum dan melakukan operasi tertib lalu lintas rutin
- Memberikan sosialisasi yang berkaitan dengan keselamatan lalu lintas.

1. Realisasi Anggaran

Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, dibiayai melalui Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat(DPA – SKPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang bersumber pada APBD Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan rincian Jumlah Anggaran dan Realisasi Penggunaan Dana Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :





Tabel 5

Realisasi Anggaran

Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)	Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
			Rp	Rp	%	%
Menguatnya Tata Kelola Pemerintah di Lingkup OPD	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersedia	Rp 28.655.312	Rp 28.655.312	99%	99%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Tersedianya Dokumen Perencanaan	Rp 28.655.312	Rp 28.655.312	99%	98%





	Daerah	an				
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Rp 3.608.486.252	Rp 3.361.809.012	100%	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	Rp 3.452.516.252	Rp 3.209.479.012	99%	99%
	Penyedia Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyedia Jasa Administra si Keuangan	Rp 155.970.000	Rp 152.330.000	99%	99%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Rp 45.000.000	Rp 37.851.920	83%	83%
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terpelihar anya prasarana transporta si	Rp 45.000.000	Rp 37.851.920	83%	83%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat		Rp 98.306.600	Rp 97.000.000	99%	100%





	Daerah					
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Disiplin Pegawai	Rp 98.306.600	Rp 97.000.000	99%	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp 501.042.725	Rp 493.247.580	99%	100%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pelaksanaan perkantoran berjalan	Rp 16.800.400	Rp 16.800.400	99%	100%
	Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Gedung Kantor	Peralatan gedung kantor tersedia	Rp 54.290.875	Rp 54.290.875	97%	100%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pelayanan perkantoran berjalan	Rp 32.250.000	Rp 24.845.000	63%	63%





	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pelayanan administra si perkantora n	Rp 84.963.000	Rp 84.913.000	100%	100%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Pelayanan administra si perkantora n	Rp 6.000.000	Rp 5.825.000	100%	100%
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Perjalanan dinas dalam dan luar daerah terlaksana	Rp 306.738.450	Rp 306.573.305	99%	99%
	Pengadaan Baranng Milik Daerah		Rp 115.707.732	Rp 114.707.000	99%	99%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersediany a Peralatan Dan Mesin Lainnya	Rp 115.707.732	Rp 114.707.000	99%	99%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Rp 107.796.677	Rp 97.476.841	100%	100%





	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pelaksanaa n perkantora n berjalan	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	100%	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pelayanan administra si perkantora n meningkat	Rp 82.996.050	Rp 72.976.214	91%	91%
	Pelayanan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pelaksanaa n perkantora n berjalan	Rp 23.800.627	Rp 23.500.627	98%	98%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Rp 588.716.763	Rp 585.952.378	95%	95%
	Penyediaan Jasa Pemeiharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Administra si Umum Meningkat	Rp 311.018.950	Rp 310.000.000	89%	89%





	atau Lapangan					
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Peralatan gedung kantor tersedia	Rp 153.585.813	Rp 152.489.568	99%	95%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor dalam kondisi baik	Rp 124.112.000	Rp 123.462.810	99%	95%
Menguatnya Konektivitas dan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		Rp 1.250.987.450	Rp 1.249.987.000	100%	100%
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Rp 1.250.987.450	Rp 1.249.987.000	100%	100%
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan	Rp 230.607.450	Rp 229.607.000	98%	100%





	Bermotor	Bermotor				
	Pelaksanaan manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jarngan Jalan		Rp 3.032.676.000	Rp 3.031.676.000	100%	100%
	Pengawasan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan	Rp 1.020.380.000	Rp 1.020.380.000	98%	100%
Menguatnya Konektivitas dan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Program Pengelolaan Pelayaran					





	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah kabupaten/Kota Yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api kabupaten/Kota		Rp 2.012.296.000	Rp 2.011.296.000	100%	100%
--	--	--	---------------------	---------------------	-------------	-------------





	Pengendalian dan pengawasan jaringan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah kabupaten/kota yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota dan/atau jaringan jalur kereta api kabupaten/kota dalam daerah kabupaten/kota	Meningkatnya Ketertiban angkutan di kawasan pelabuhan laut & sungai	Rp 1.526.296.000	Rp 1.526.296.000	99%	99%
	Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP Untuk Pelabuhan Sungai dan Danau					





	Pelaksanaan penyusunan rencana induk dan daerah lingkungan kerja (DLKR/Daerah lingkungan kepentingan (DLKP) untuk pelabuhan sungai dan danau	Tersediany a dokumen halte sungai	Rp 150.000.000	Rp 150.000.000	99%	99%
	Pembanguna n dan Penerbitan Izin Pembanguna n dan Pengoperasia n Pelabuhan Sungai dan Danau					
	Pengoperasia n dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Halte Sungai dalam kondisi baik	Rp 336.000.000	Rp 335.000.000	99%	99%





BAB IV

PENUTUP

Selama tahun 2022, Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah melaksanakan tugas dan fungsinya semaksimal mungkin, terutama dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan dengan telah ditetapkan dengan didukung anggaran atau pembiayaan yang cukup.

Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, untuk melaksanakan tupoksi. Ketercapaian target yang terealisasi tidak terlepas dari adanya dukungan manajemen Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang selalu melaksanakan seluruh tugas dan fungsi yang diembannya dengan penuh tanggung jawab.

Tingkat keberhasilan atas indikator kinerja utama (sasaran) sebagaimana dimuat dalam Renstra dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dapat disimpulkan secara umum capaian kinerja tahun 2022 Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih terdapat indikator kinerja kegiatan yang mendukung sasaran tersebut masih belum mencapai hasil yang optimal atau masih dibawah target yang ditetapkan tahun 2022, Hal ini menjadi tantangan dan bahan perbaikan terkait kegiatan iyang akan dilakukan pada tahun yang akan datang

